

## ABSTRAK

### INKONSISTENSI LANDASAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan melahirkan akibat hukum tertentu dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah peraturan mengenai harta kekayaan suami dan isteri baik yang berasal sebelum maupun selama perkawinan. Pada dasarnya pengaturan mengenai harta kekayaan perkawinan telah diatur dalam Hukum Adat, Hukum Islam, KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana diketahui, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta benda perkawinan tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya PP No.9 tahun 1975, sehingga belum berlaku secara efektif. Terhadap ketentuan yang belum berlaku efektif, Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa dalam praktek penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan terjadi inkonsistensi dalam penerapan landasan hukum? Bagaimana akibat hukum dengan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan landasan hukum penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian suatu kasus atau peristiwa yang menjadi didalam masyarakat, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peristiwa hukum atau kasus nyata yang ada didalam masyarakat yang berhubungan dengan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan: terjadinya inkonsistensi landasan hukum dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan disebabkan ketidaktegasan landasan hukum yang digunakan. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan UUP yang belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, karena belum dapat diperlakukan secara efektif. Akibat hukum terjadinya inkonsistensi penggunaan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan para pihak yang berperkara dalam praktik terkait dengan penerapan aturan hukum harta kekayaan perkawinan khususnya dilingkungan peradilan. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian kawin merupakan jalan keluarnya penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan.

Saran: Konsep penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan tersebut sebaiknya dapat dituangkan dalam peraturan pemerintah yang dibuat secara rinci dan sebagai penyatuan hukum dari penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Landasan Hukum, Sengketa harta kekayaan perkawinan

## **ABSTRACT**

### **INCONSISTENCY OF LEGAL BASIS IN THE DISPUTE RESOLUTION OF MARITAL PROPERTY**

A marriage help between a man and a woman will lead to particular legal effect in their household. One of the legal effects of a marriage is the rule of the property of both husband and wife before or after the marriage. Basically, the rule on marital property has been set in Customary Law, Islamic Law, Civil Code, and Law No.1 of 1974 on marriage. When a marriage is held after October 1, 1975. The basis used is the provisions of law no. 1 of 1974 on marriage. It is commonly recognized that the provisions related to marital property are not regulated further in their implementation rule of the Government Regulation (PP) No. 9 of 1975 so that it is not effectively applicable. Regarding the law which is not effectively applicable, article 66 of law no. 1 of 1974 on marriage provides possibilities to apply previous laws or regulations.

The problems in this research were: Why did the dispute resolution of marital property in practice have inconsistencies in terms of legal basis application? How were the legal effects of the inconsistencies in the application of legal basis in the dispute resolution of marital property?

The research method used in this research was juridical empirical method, which is a research of a case or event occurred in society, because this research was conducted or aimed to the existing legal events or real cases in society related to the legal principles, written laws, or other legal materials.

The research results show: the inconsistencies of legal basis in the dispute resolution of marital property were caused by the irresolution of the legal basis used. It was due to the implementation of marriage law which has not been set further in its implementation rule since it could not be applied effectively. The legal effects of the inconsistencies in the use of legal basis in the dispute resolution of marital property created uncertainty and injustice in the disputed parties in practice related to the application of the law of marital property, particularly in the court. To anticipate the conflict before performing a marriage, a marital agreement is made as the solution for the dispute resolution of marital property.

Recommendation: the concept of the dispute resolution of marital property should be in the form of a government regulation made in detail and as the integration of law of the dispute resolution of marital property.

Keywords: Inconsistency, Legal Basis, Dispute of Marital Property